

Pengaruh Kinerja ESG dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024)

Amalia Ayu Pratiwi^{1*}, Eko Suwardi²

¹ Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2020 hingga 2024. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, yang menghasilkan 34 perusahaan dengan total 170 observasi.

Temuan – Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Kinerja ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin baik kinerja ESG, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 2) Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa praktik manajemen laba tidak selalu diarahkan untuk mengurangi beban pajak. 3) Komisaris independen memperlemah pengaruh kinerja ESG terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan dengan hipotesis awal. Namun, komisaris independen berhasil memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan cara memperlemah praktik penghindaran pajak.

Batasan/Implikasi – Penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk sektor lain. Selain itu, penggunaan skor ESG yang diambil dari database Thomson Reuters terbatas, karena tidak semua perusahaan manufaktur di Indonesia sudah memiliki skor ESG yang tercatat.

Orisinalitas – Penelitian ini memperkaya literatur dengan mengkaji hubungan antara ESG, manajemen laba, dan penghindaran pajak dengan melibatkan komisaris independen sebagai variabel moderasi, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Tanggal masuk 28

Agustus 2025

Diterima 30 April 2026

Kata Kunci:

ESG, Manajemen Laba,
Penghindaran Pajak,
Komisaris Independen

ISSN: 2302-1500

* Corresponding Author Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
E-mail address: amiliaayupratiwi@mail.ugm.ac.id (author#1)

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak merupakan isu penting dalam sistem perpajakan global karena berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Praktik ini umumnya dilakukan melalui *corporate tax abuse* dan *offshore tax evasion*, dengan kerugian global mencapai USD 492 miliar setiap tahun (Tax Justice Network, 2024). Negara berkembang merasakan dampak lebih besar, termasuk Indonesia yang kehilangan sekitar USD 3,04 miliar per tahun, setara dengan 11,6% dari anggaran kesehatan (Tax Justice Network, 2024).

Secara etis, penghindaran pajak menimbulkan perdebatan karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan memperlebar ketimpangan (Batubara & Lastanti, 2024). Dalam konteks keberlanjutan, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dipandang dapat mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, termasuk dalam hal kepatuhan pajak (Yoon dkk., 2021). Namun, fenomena perusahaan dengan skor ESG tinggi tetapi tetap melakukan penghindaran pajak, seperti *Amazon* (Tarek Abdelfattah, 2020), menimbulkan pertanyaan apakah ESG benar-benar mencerminkan perilaku etis perusahaan atau sekadar strategi reputasi.

Selain itu, praktik manajemen laba juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak karena memberikan ruang bagi manajer untuk mengatur laba demi tujuan tertentu, termasuk pengurangan beban pajak (Scott, 2015). Hubungan ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Komisaris independen, sebagai bagian dari struktur *good corporate governance*, diharapkan mampu menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa komisaris independen berperan memperlemah hubungan praktik manajerial yang tidak etis dengan penghindaran pajak (Rahma & Firmansyah, 2022; Thalita et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kinerja ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

Penelitian mengenai hubungan antara kinerja ESG, manajemen laba, dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang masih inkonsisten dalam literatur. Sebagian studi menemukan bahwa ESG mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sementara studi lain menunjukkan bahwa ESG tidak selalu mencerminkan perilaku fiskal yang lebih etis, bahkan dapat bersifat simbolik. Ketidakkonsistenan ini membuka ruang bagi penelitian yang tidak hanya menguji hubungan antar variabel, tetapi juga menjelaskan kondisi di mana mekanisme tersebut bekerja atau gagal bekerja.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, karakteristik kelembagaan seperti tingkat penegakan regulasi, kedewasaan implementasi ESG, serta efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan menguji pengaruh ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak, tetapi juga memberikan penjelasan kontekstual mengenai bagaimana peran komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola dapat memperkuat atau justru melemahkan hubungan tersebut dalam setting institusional Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Dalam kerangka teori keagenan, hubungan kontraktual antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) sering menimbulkan konflik akibat perbedaan kepentingan dan asimetri informasi (Jensen &

Meckling, 2012). Konflik ini mendorong manajer melakukan tindakan oportunistik, seperti manajemen laba untuk memanipulasi laporan keuangan (Sadjiarto et al., 2024; Scott, 2015) atau penghindaran pajak melalui strategi perencanaan pajak agresif yang sah secara hukum tetapi dipertanyakan secara etis (Yoon dkk., 2021; Zeng, 2019).

Sebagai upaya menekan perilaku tersebut, penerapan ESG dipandang sebagai mekanisme pengawasan internal yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen etis perusahaan (Sadjiarto dkk., 2024). Namun, keberadaan ESG saja belum cukup, sehingga dibutuhkan pengawasan eksternal yang independen, salah satunya melalui komisaris independen.

Komisaris independen berperan penting menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik dan manajemen dengan memberikan evaluasi yang objektif terhadap keputusan strategis perusahaan. Dengan demikian, dalam kerangka teori keagenan, ESG dan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang menekan risiko perilaku oportunistik, sedangkan manajemen laba dan penghindaran pajak mencerminkan bentuk konflik keagenan yang berpotensi merugikan pemilik perusahaan.

Teori Pemangku Kepentingan

Menurut teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, penerapan ESG menjadi relevan karena menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang serius menerapkan ESG cenderung lebih dihargai oleh masyarakat dan investor (Thalita dkk., 2022).

Namun, implementasi ESG tidak selalu menjamin perilaku etis jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif.

Komisaris independen berperan strategis sebagai pengawas eksternal untuk memastikan bahwa inisiatif ESG dijalankan secara nyata, termasuk dalam aspek kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memperkuat pengaruh ESG terhadap penurunan praktik penghindaran pajak (Hidayati & Zuhroh, 2023). Hal ini menegaskan bahwa dalam kerangka teori pemangku kepentingan, keberadaan komisaris independen membantu memastikan komitmen keberlanjutan perusahaan selaras dengan ekspektasi pemangku kepentingan, terutama terkait akuntabilitas fiskal.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi tanpa melanggar hukum secara eksplisit (Sadjiarto dkk., 2024). Teknik yang umum digunakan antara lain pemanfaatan insentif pajak, manipulasi *transfer pricing*, hingga pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Falbo & Firmansyah, 2021; Yoon dkk., 2021).

Meskipun sah secara hukum, praktik ini menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan dipandang tidak etis oleh investor, regulator, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus memperketat regulasi dan pengawasan untuk mencegah penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Environmental, Social, and Governance (ESG)

ESG merupakan konsep yang menilai tanggung jawab perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Aspek lingkungan mencakup pengelolaan sumber daya, efisiensi energi, dan pengurangan emisi; aspek sosial terkait dengan tenaga kerja, hak asasi manusia, serta keterlibatan komunitas;

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

sedangkan aspek tata kelola berhubungan dengan kepemimpinan, transparansi, serta perlindungan hak pemegang saham (Falbo & Firmansyah, 2021).

Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik umumnya memiliki reputasi positif, lebih menarik bagi investor, serta dinilai lebih siap menghadapi risiko regulasi dan sosial (Sadjiarto dkk., 2024; Yoon dkk., 2021). Seiring berkembangnya regulasi dan standar global, ESG tidak lagi sekadar tren, tetapi menjadi faktor strategis yang fundamental dalam pengambilan keputusan bisnis jangka panjang.

Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan praktik yang dilakukan manajer dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kepentingan tertentu, seperti memenuhi target, meningkatkan nilai perusahaan, atau memperoleh keuntungan pribadi (Sadjiarto dkk., 2024; Scott, 2015). Praktik ini dilakukan melalui pemilihan metode akuntansi, pengakuan pendapatan atau beban pada periode berbeda, tanpa melanggar aturan secara eksplisit.

Beberapa pola umum manajemen laba meliputi *income smoothing* (menjaga stabilitas laba), *income minimization*, *income maximization*, serta *taking a bath* (melaporkan kerugian besar untuk keuntungan di periode berikutnya (Falbo & Firmansyah, 2021). Asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham menjadi pemicu utama, karena manajer memiliki kontrol lebih besar atas informasi keuangan. Jika dibiarkan, praktik ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan serta melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi perusahaan.

Komisaris Independen

Menurut POJK No. 56/POJK.04/2017, komisaris independen adalah anggota dewan yang bebas dari kepemilikan saham maupun hubungan pribadi dengan perusahaan, dengan kewajiban minimal 30% dari total dewan (Zealio Doho & Budi Santoso, 2020). Peran utamanya adalah mengawasi dan mengevaluasi manajemen agar selaras dengan prinsip *good corporate governance*.

Sebagai bagian penting dari struktur tata kelola, komisaris independen diharapkan mampu mencegah perilaku oportunistik manajemen, seperti manipulasi laba untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mereka dapat membatasi praktik manajemen laba agresif sekaligus menekan strategi penghindaran pajak.

3. Pengembangan Hipotesis

Kinerja ESG dan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi legal perusahaan untuk menekan kewajiban pajak, namun sering dipandang kontroversial secara etika. Dalam hal ini, kinerja ESG menjadi indikator penting tanggung jawab sosial yang mendorong perusahaan lebih transparan, menjaga reputasi, dan patuh pada kewajiban perpajakan (Yoon dkk., 2021).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Vraza dkk., (2024) menemukan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia dengan penerapan ESG yang kuat memiliki kecenderungan lebih rendah melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) yang menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

demikian, ESG berperan sebagai faktor pengendali perilaku fiskal perusahaan (López-González dkk., 2019).

H1: Kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak

Manajemen laba memiliki hubungan erat dengan penghindaran pajak karena keduanya sama-sama memanfaatkan manipulasi akuntansi untuk tujuan strategis, termasuk menekan beban pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manipulasi laba berbasis akrual sering dilakukan bersamaan dengan strategi penghindaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan akrual diskresioner untuk menurunkan laba fiskal tanpa menurunkan laba akuntansi yang dilaporkan (Falbo & Firmansyah, 2021).

Dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 2012), konflik kepentingan antara pemilik dan manajer mendorong manajer bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi, seperti bonus berbasis laba atau pencitraan perusahaan. Hal ini memperkuat kecenderungan menggunakan manajemen laba untuk tujuan penghindaran pajak. Velte (2020) juga menegaskan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu motivasi utama praktik manajemen laba melalui pengaturan pendapatan dan beban.

H2: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen memoderasi pengaruh Kinerja ESG terhadap penghindaran pajak

Perusahaan dengan skor ESG tinggi umumnya diharapkan mengurangi praktik penghindaran pajak demi menjaga reputasi di mata pemangku kepentingan (Sadjiarto dkk., 2024). Namun, dalam praktiknya, beberapa

perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak untuk efisiensi keuangan. Di sinilah komisaris independen berperan sebagai moderator yang memastikan pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak berjalan efektif.

Dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 2012), konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham mendorong perilaku oportunistik, termasuk penghindaran pajak agresif (Scott, 2015). Kehadiran komisaris independen dengan sifat objektif dapat membatasi perilaku ini (Nalarreason & Prameswari, 2025). Hal ini juga sesuai dengan teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), yang menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban lebih luas, termasuk kepatuhan terhadap pajak.

Penelitian (Hidayati & Zuhroh, 2023) menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memperkuat komitmen etis perusahaan. Dengan demikian, kehadiran mereka diyakini memperkuat hubungan antara kinerja ESG dan penghindaran pajak.

H3: Komisaris independen memperkuat pengaruh kinerja ESG terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak

Dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 2012), konflik antara manajer dan pemegang saham sering mendorong praktik oportunistik seperti manajemen laba, yang dapat digunakan untuk menekan beban pajak (Falbo & Firmansyah, 2021). Praktik ini merugikan pemangku kepentingan lain, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif.

Komisaris independen berperan penting sebagai pengawas eksternal untuk memastikan keputusan manajer selaras dengan

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan yang lebih luas, sebagaimana ditekankan dalam teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Mereka diharapkan dapat mengarahkan perusahaan pada praktik perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab (Nalarreason & Prameswari, 2025).

Sejumlah studi empiris menegaskan peran ini. (Rahma & Firmansyah, 2022) menunjukkan bahwa komisaris independen dapat mengurangi insentif manajer menggunakan manipulasi laba untuk tujuan penghindaran pajak, sementara (Hidayati & Zuhroh, 2023) menemukan bahwa pengawasan independen mampu menekan praktik manajemen laba yang berorientasi pada penghindaran pajak. Dengan demikian, komisaris independen berfungsi sebagai penghambat dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak.

H4: Komisaris independen memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kinerja ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan kausal antar variabel secara objektif menggunakan data numerik (Baltagi, 2021). Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA), yang memungkinkan peneliti mengevaluasi tidak hanya pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga peran interaksi moderasi. Untuk memastikan hubungan antar variabel independen dan

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

dependen tidak terpengaruh oleh variabel luar lain, penelitian juga memasukkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan ROA.

Penelitian ini memfokuskan populasi pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan sejumlah kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) perusahaan yang secara konsisten terdaftar di sektor manufaktur BEI sepanjang periode 2020–2024; (2) perusahaan yang memiliki skor ESG dan tercatat dalam *database Thomson Reuters* pada periode yang sama; (3) Perusahaan yang menyediakan data laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap serta relevan dengan variabel penelitian selama masa pengamatan. Pengukuran variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel dan Pengukuran

Jenis Variabel	Nama Variabel	Pengukuran
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Variabel Independen	Kinerja ESG Manajemen Laba	Database <i>Thomson Reuters</i> <i>Discretionary accruals</i> menggunakan <i>Modified Jones Model</i>
Variabel Moderasi	Komisaris Independen	$\frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Dewan Komisaris}}$
Variabel Kontrol	Ukuran Perusahaan	$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$
	ROA	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data penelitian mencakup laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melalui situs resmi (www.idx.co.id), serta skor ESG yang diambil dari database *Thomson Reuters*

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

untuk perusahaan manufaktur di Indonesia. Data terkait manajemen laba diperoleh dari laporan keuangan dan database *Thomson Reuters* dengan menggunakan model *Modified Jones* untuk mendeteksi akrual diskresioner. Informasi mengenai komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, sedangkan perhitungan ETR dilakukan dengan menggunakan data total beban pajak dan laba sebelum pajak yang juga bersumber dari database *Thomson Reuters*.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur, melalui tahapan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, regresi data panel, dan *moderated regression analysis* (MRA), dengan bantuan perangkat lunak Stata 17.

Selanjutnya uji asumsi klasik. Pertama, uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria nilai VIF < 10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Kedua, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji kesamaan varian residual antar pengamatan. Dengan metode *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Test*, model dianggap bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2013).

Analisis regresi data panel, dengan tiga pendekatan model: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM). Penentuan model yang paling sesuai dilakukan dengan menggunakan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, serta Uji *Langrange Multiplier*.

Model regresi

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 ESG_{it} + \beta_2 EM_{it} + \beta_3 KI_{it} + \beta_4 (ESG_{it} * KI_{it}) + \beta_5 (EM_{it} * KI_{it}) + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 ROA_{it} + e$$

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Terakhir, uji hipotesis mencakup uji t, untuk menilai sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap pengungkapan emisi karbon. Hipotesis diterima jika p-value ≤ 0,05. Kedua, uji F untuk mengevaluasi apakah semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon dan Koefisien determinasi (R²), digunakan mengukur sejauh mana adanya tingkat variasi pada variabel dependen mampu diterangkan oleh model.

5. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil observasi terhadap 170 sampel dari 34 perusahaan manufaktur periode 2020–2024, variabel dependen penghindaran pajak (ETR) menunjukkan nilai minimum -0,81 dan maksimum 0,78, dengan rata-rata -0,22 dan standar deviasi 0,16. Hal ini mengindikasikan adanya variasi strategi pengelolaan kewajiban pajak, dari agresif hingga konservatif.

Untuk variabel independen, kinerja ESG memiliki nilai minimum 11,5 dan maksimum 82,83, dengan rata-rata 40,75 dan standar deviasi 17,63, mencerminkan perbedaan komitmen antar perusahaan dalam praktik keberlanjutan. Manajemen laba (EM) memiliki rentang -2,16 hingga 5,5 dengan rata-rata 0,18 dan standar deviasi 1,61, menunjukkan praktik yang relatif rendah namun bervariasi. Komisaris independen (KI) berkisar antara 0,2 hingga 0,83, dengan rata-rata 0,44 dan standar deviasi 0,12, menandakan proporsi yang relatif seragam di antara perusahaan sampel.

Sementara itu, variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) rata-rata sebesar 30,78 dengan standar deviasi 1,82, mencerminkan dominasi perusahaan besar dalam sampel. Profitabilitas (ROA) rata-rata 0,20 dengan standar deviasi 0,31, namun

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

terdapat variasi cukup tinggi antar perusahaan dalam menghasilkan laba.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF < 10 (Mean VIF 1,10), sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Sementara itu, uji heteroskedastisitas dengan *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg* menghasilkan p-value 0,1241 (> 0,05), yang berarti model bebas heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi klasik.

Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier*. Hasil uji *Chow* menunjukkan FEM lebih tepat dibanding CEM, sementara uji *Hausman* mengindikasikan REM lebih sesuai ($p = 0,0563 > 0,05$). Uji *LM* kemudian menghasilkan $p = 0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa REM adalah model terbaik untuk analisis dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil uji *T* menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (koefisien = -0,0082; p-value = 0,026), sehingga H1 terdukung. Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan (koefisien = -0,0893; p-value = 0,025), namun arah hubungan berbeda dari dugaan awal, sehingga H2 tidak terdukung. Interaksi ESG × komisaris independen berpengaruh positif signifikan (koefisien = 0,0161; p-value = 0,032), menunjukkan bahwa komisaris independen justru memperlemah pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 tidak terdukung. Sebaliknya, interaksi manajemen laba × komisaris independen berpengaruh positif signifikan (koefisien = 0,1997; p-value = 0,046), yang

berarti komisaris independen memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 terdukung.

Untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif signifikan (koefisien = 0,0192; p-value = 0,022), sedangkan profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan (koefisien = -0,0856; p-value = 0,051).

Hasil uji *F* menunjukkan nilai *Wald Chi*² = 16,97 dengan probabilitas 0,0176 (< 0,05), sehingga model regresi signifikan secara statistik. Artinya, seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan model mampu menjelaskan variasi tingkat penghindaran pajak secara keseluruhan. Nilai *R*² sebesar 0,1491 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 14,91% variasi penghindaran pajak, sedangkan 85,09% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Hal ini mengindikasikan keterbatasan model dan adanya variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Pembahasan

Pengaruh Kinerja ESG terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ($p = 0,026 < 0,05$), sehingga hipotesis terdukung. Artinya, semakin tinggi kinerja ESG, semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode penelitian. Temuan ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), di mana kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjaga reputasi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (Yoon dkk., 2021).

Penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menemukan bahwa

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung tidak melakukan strategi pajak agresif (Binhadab, 2025; Jiang dkk., 2024; Thalita dkk., 2022). Penerapan ESG meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat tata kelola yang baik, sehingga kepatuhan pajak menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan. Dengan demikian, hasil ini memperkuat validitas H1 bahwa ESG dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang memprediksi pengaruh positif tidak terdukung. Artinya, praktik manajemen laba yang lebih tinggi justru terkait dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa manajemen laba dilakukan untuk tujuan lain seperti menjaga stabilitas laporan keuangan atau memberi sinyal positif kepada pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan Kaldowski & Jewartowski (2020) serta Ben Salah (2024), yang menemukan bahwa perusahaan dengan praktik manajemen laba tinggi cenderung tidak agresif dalam perencanaan pajak demi menghindari risiko pengawasan dan menjaga reputasi.

Dari perspektif teori keagenan, manajer menghindari penghindaran pajak agresif karena berisiko menimbulkan masalah hukum dan konflik dengan stakeholder eksternal, sehingga lebih memilih manajemen laba yang relatif aman. Sementara itu, menurut teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), perusahaan menahan diri dari penggunaan manajemen laba sebagai alat penghindaran pajak demi menjaga kredibilitas, kepatuhan, dan hubungan jangka panjang dengan

stakeholder, termasuk pemerintah. Dengan demikian, hipotesis H2 tidak terdukung, dan praktik manajemen laba dalam penelitian ini lebih berorientasi pada kepentingan non-fiskal serta komitmen pada akuntabilitas perusahaan.

Komisaris Independen memoderasi pengaruh Kinerja ESG terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa interaksi antara kinerja ESG dan komisaris independen berpengaruh signifikan, namun dengan koefisien positif. Artinya, komisaris independen justru memperlemah pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis tidak terdukung. Hal ini bertentangan dengan teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984) yang berasumsi bahwa komisaris independen akan mendukung komitmen ESG, termasuk kepatuhan pajak. Dalam perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 2012), temuan ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan komisaris independen dalam menekan perilaku oportunistik manajer.

Temuan ini sejalan dengan fenomena global sebagaimana diungkap dalam *The Missing "T" in ESG* (Chaim & Parchomovsky, 2024), bahwa meskipun perusahaan dengan skor ESG tinggi mendapat dukungan investor institusi besar, mereka tetap menjadi penghindar pajak agresif. Investor institusi, yang seharusnya menjadi *stewards of governance*, justru mentoleransi bahkan mendorong penghindaran pajak demi menjaga imbal hasil investasi. Hal ini menegaskan adanya celah dalam sistem ESG, di mana aspek perpajakan tidak terintegrasi dalam dimensi *governance*, sehingga mekanisme tata kelola, baik eksternal (investor institusi) maupun internal (komisaris independen), tidak mampu memoderasi hubungan ESG dan penghindaran pajak.

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Kondisi serupa juga terlihat di Indonesia, di mana komisaris independen sering hanya menjadi formalitas regulasi tanpa kompetensi dan independensi yang memadai (Rahma & Firmansyah, 2022). Lemahnya peran pengawasan membuat peningkatan kinerja ESG tidak otomatis menurunkan penghindaran pajak. Dengan demikian, penolakan H3 dapat dijelaskan oleh kelemahan struktural sistem ESG dan keterbatasan peran komisaris independen. Reformasi sistem penilaian ESG yang memasukkan indikator transparansi pajak dan perilaku pajak yang bertanggung jawab dalam aspek *governance* menjadi penting, agar mekanisme pengawasan seperti komisaris independen benar-benar efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak.

Komisaris Independen memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian H4 menunjukkan bahwa komisaris independen berperan signifikan dalam memperlemah hubungan manajemen laba dengan penghindaran pajak, sehingga hipotesis terdukung. Temuan ini konsisten dengan Nalarreason & Prameswari (2025) serta Thalita dkk., (2022) yang menegaskan bahwa komisaris independen mampu memitigasi praktik oportunistik manajer, termasuk penggunaan manajemen laba untuk tujuan penghindaran pajak.

Dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 2012), komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Dengan pengawasan independen, kecenderungan manajer memanfaatkan manajemen laba untuk menekan kewajiban pajak dapat ditekan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Kałdoński & Jewartowski (2020) yang menemukan bahwa perusahaan dengan pengawasan eksternal

tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak bersamaan dengan manajemen laba.

Secara keseluruhan, keberadaan komisaris independen terbukti meningkatkan kualitas tata kelola dengan mengurangi ruang bagi praktik oportunistik. Dengan demikian, peran mereka efektif sebagai moderator dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak, sesuai dengan prinsip-prinsip teori agensi.

6. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kinerja ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada 34 perusahaan manufaktur BEI (170 sampel) periode 2020–2024, menggunakan regresi berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan: (1) kinerja ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, mendukung teori pemangku kepentingan bahwa perusahaan berkomitmen pada keberlanjutan akan menjaga reputasi dan patuh pajak; (2) manajemen laba tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga praktiknya tidak selalu diarahkan untuk meminimalkan beban pajak; (3) komisaris independen tidak memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak, bahkan memperlemah efektivitas ESG sebagai mekanisme kontrol; dan (4) komisaris independen memperlemah hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak, menegaskan peran pengawasan mereka dalam meningkatkan akuntabilitas dan menekan praktik perpajakan agresif.

7. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke sektor atau wilayah lain. Jumlah sampel juga terbatas karena variasi ketersediaan data ESG dan pajak, sehingga berpotensi memengaruhi kekuatan statistik analisis. Kedua, penelitian sepenuhnya bergantung pada data publik dari laporan tahunan, sehingga ketidaklengkapan atau kekurangan informasi pada beberapa perusahaan dapat memengaruhi hasil. Ketiga, pengukuran kinerja ESG menggunakan skor dari database *Thomson Reuters* masih terbatas, khususnya di Indonesia, di mana belum semua perusahaan memiliki skor ESG. Hal ini membatasi kelengkapan data yang dianalisis, meskipun sektor manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang cukup besar.

8. Implikasi

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting dari sisi praktis, regulator, maupun akademis. Secara praktis, perusahaan di BEI perlu lebih serius mengintegrasikan prinsip ESG dalam strategi bisnis serta transparan dalam pengungkapannya, karena praktik manajemen laba dan penghindaran pajak berpotensi merusak reputasi di mata publik dan regulator. Bagi otoritas pajak, hasil ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penghindaran pajak dengan mempertimbangkan laporan keberlanjutan ESG sebagai salah satu instrumen. Selain itu, lemahnya efektivitas komisar independen dalam mengawasi perilaku manajemen menegaskan perlunya

penguatan tata kelola untuk mengurangi tindakan oportunistik.

Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan ESG, manajemen laba, dan penghindaran pajak dengan komisar independen sebagai variabel moderasi. Hasil yang menunjukkan bahwa komisar independen justru memperlemah pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak membuka peluang penelitian lanjutan terkait efektivitas fungsi pengawasan, termasuk faktor lain seperti struktur kepemilikan, karakteristik manajer, maupun kondisi makroekonomi. Penelitian selanjutnya juga perlu mengeksplorasi mekanisme *governance* alternatif yang lebih efektif dalam memitigasi penghindaran pajak pada perusahaan dengan kinerja ESG tinggi, serta bagaimana kebijakan keberlanjutan dapat diintegrasikan dengan transparansi dan akuntabilitas perpajakan.

Daftar Pustaka

- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Ben Salah, O. (2024). Analyzing the causal relationship between tax avoidance and earnings management: Evidence from the STOXX Europe 600 Index. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 23(1).
<https://doi.org/10.24818/jamis.2024.01002>
- Binhadab, N. (2025). ESG performance and cash effective tax rates: Evidence from UK listed firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 58.
<https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2025.100683>

<https://doi.org/10.22146/abis.v14i1.110757>

Copyright©2026 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

- Chaim, D. A., & Parchomovsky, G. (2024). ESSAYS The Missing “T” in ESG. 790–843. <https://www.advratings.com/top-us-asset-managers>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A stakeholder approach*. Boston.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (7 ed)*. Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayati, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition (pp. 283–303). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jiang, H., Hu, W., & Jiang, P. (2024). Does ESG performance affect corporate tax avoidance? Evidence from China. *Finance Research Letters*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105056>
- Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2020). Do firms using real earnings management care about taxes? Evidence from a high book-tax conformity country. *Finance Research Letters*, 35. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101351>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Marlina Nalarreason, K., & Putu Anindya Sarasija Prameswari, N. (2025). Do Independent Commissioners Restrain Earning Management and Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 96–111. <http://journal.maranatha.edu96>
- Mikha Btari Batubara, & Hexana Sri Lastanti. (2024). Pengaruh Political Connection, Earning Management, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.4376>
- Rahma, R. A., & Firmansyah, A. (2022). Does independent commissioner have a role in the relationship between sustainability disclosure, debt policy, and tax avoidance? *Journal of Contemporary Accounting*, 65–79. <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss2.art1>
- Sadjiarto, A., Ringoman, J. A., & Angela, L. (2024). The Effects of Earning

- Management and Environmental, Social, Governance (ESG) on Tax Avoidance with Leverage as A Moderating Variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.63-74>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (Seventh Edition). Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Tarek Abdelfattah, A. A. (2020). *Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market*. 38.
- Tax Justice Network. (2024). *State of Tax Justice 2024*.
- Thalita, A. A., Hariadi, B., & Rusydi, M. K. (2022). The effect of earnings management on tax avoidance with political connections as a moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(5), 344–353. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1864>
- Velte, P. (2020). Corporate social responsibility and earnings management: A literature review. *Corporate Ownership and Control*, 17(2), 8–19. <https://doi.org/10.22495/cocv17i2art1>
- Vraza, P., Krisna, A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh Esg Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Struktur Kepemilikan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Yoon, B., Lee, J.-H., & Cho, J.-H. (2021). The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance—Evidence from Korea. *Sustainability*, 13(12), 6729. <https://doi.org/10.3390/su13126729>
- Zealio Doho, S., & Budi Santoso, E. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>